

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TERHADAP PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH**

Oleh

**SIDIQ TEJA PURNA**

Pengelolaan Aset Tetap Daerah merupakan suatu kegiatan pengelolaan aset yang dilakukan oleh seluruh unsur Instansi Pemerintah. Pengelolaan Aset Tetap Daerah merupakan suatu kegiatan yang penting karena menyangkut pengelolaan kekayaan Daerah dan Negara. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang selanjutnya diterapkan sebagai pedoman teknis pengelolaan Aset Tetap Daerah oleh pengelola aset. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan Peraturan tersebut dalam pengelolaan Aset Tetap Daerah serta memberikan rekomendasi strategis dalam Pengelolaan Aset Tetap daerah berdasarkan kondisi yang ada di Daerah.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen, serta diproses dengan teknik analisis data menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Dimana teknik penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan masa observasi yang panjang, pengamatan yang terus menerus, serta mengadakan member check kepada sumber data yang ada agar data yang dihasilkan benar-benar merupakan kondisi yang sebenarnya yang terjadi pada objek penelitian.

Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Daerah Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji ini memperoleh hasil bahwa penerapan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 sudah berjalan baik namun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dikarenakan belum dibuatnya beberapa dokumen pengelolaan Aset Tetap. Berdasarkan hasil dari penilaian Tabel Prosentase Kelengkapan Dokumen Penerapan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji telah sesuai dengan pedoman yang ada dan juga dibantu dengan pedoman petunjuk pelaksanaan pengelolaan Aset Tetap yang ada pada Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2013 namun baru bisa terealisasi sebesar 70% dari keseluruhan dokumen yang harus dibuat.

**Kata kunci :** Pengelolaan, Aset Tetap Daerah atau Barang Milik Daerah, Permendagri, Pengelolaan Aset yang Berkualitas.